



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
**UNIT KERJA** : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : VEGA LAZUARDI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 517020

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 248.000.000

1. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/112 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, LAINNYA Rp. 168.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 103.460.000

1. MOTOR, SUZUKI FD110 Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.430.000
2. MOTOR, HONDA Y1G02N13L0 AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, SUZUKI THUNDER/EN125 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.030.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA G AT / TGN40RGKPKDKD Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 29.842.880**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 45.698.244**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 427.001.124

**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 427.001.124

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.